

PEDOMAN – AUDIT KINERJA  
2022

PERBUP DEMAK NO.51, BD 2022/NO.51, LL. SETDA KAB. DEMAK 57 HLM.  
PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PEDOMAN AUDIT KINERJA ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang professional, efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dilakukan Audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efisiensi dan efektifitas;
- Agar pelaksanaan audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman audit kinerja atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.16 Tahun 1976; PP No.8 Tahun 2006; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.23 Tahun 2007; PerBPKP No.6 Tahun 2018; Perda Kab.Demak Nomor 5 tahun 2016; Perbup Demak No.7 Tahun 2021.
  - Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi APIP pada Inspektorat Daerah agar memiliki kesamaan persepsi dan keseragaman metodologi sesuai standar audit dalam melaksanakan audit kinerja berbasis risiko atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    - a. menilai pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang bersumber dari APBD sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pencapaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah yang efisien, efektif dan ekonomis secara berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola Perangkat Daerah; dan
    - b. Pedoman teknis bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara efisien, efektif dan ekonomis sehingga tercapai peningkatan kinerja tugas dan fungsi serta tujuan organisasi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 21 Nopember 2022.

- Lampiran 50 halaman.